

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara. Kemiskinan absolut merupakan tingkat kemiskinan yang diukur berdasarkan suatu garis kemiskinan tertentu. Sementara kemiskinan relatif merupakan tingkat kemiskinan yang diukur secara relatif antar penduduk. Kompleksitas penyelesaian permasalahan kemiskinan disebabkan pendekatan yang dilakukan tidak hanya dari aspek ekonomi semata namun aspek sosial harus dipertimbangkan. Selain itu tidak terjadinya pemerataan hasil pembangunan juga merupakan faktor penyebab yang tidak dapat diabaikan.

Menurut UNICEF dalam (Andriyanto, 2001,hlm.10), Kemiskinan sebagai ketidakmilikan hal-hal secara materi kebutuhan minimal manusia termasuk kesehatan, pendidikan dan jasa-jasa lainnya yang dapat menghindarkan manusia dari kemiskinan. Ravalion menyatakan dalam dekade 1970-an merumuskan garis kemiskinan (*poverty line*) untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar setiap orang berupa kebutuhan makan, pakaian serta perumahan sehingga dapat menjamin kelangsungan hidupnya.

Jawa Barat merupakan provinsi yang paling dekat dengan pusat pembangunan Indonesia, namun hal ini tidak lantas menyebabkan Jawa Barat terlepas dari kemiskinan. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Barat No. 34/07/32/Th.XV ,2013 , jumlah penduduk miskin di Jawa Barat pada bulan Maret 2013 sebanyak 4.297.038 orang (9,52 %). Mengalami penurunan sebesar 124.446 orang (0,37 %) dibandingkan kondisi pada bulan September 2012 yang berjumlah 4.421.484orang (9,89 %). Dalam kurun waktu enam bulan terakhir persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan turun sebesar 0,54 persen sedangkan di daerah perkotaan turun 0,27 persen. Secara absolut selama periode September 2012 – Maret 2013, penduduk miskin di pedesaan berkurang 65.424 orang sementara di perkotaan turun sebanyak 59.022 orang.

Berbicara mengenai kemiskinan di Jawa Barat, Kota Bandung yaitu merupakan salah satu daerah Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk miskin

Indri Ani , 2015

***OPTIMALISASI ZAKAT PROFESI DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA BANDUNG***

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

cukup besar. Padahal, pusat perekonomian dan pembangunan Jawa Barat berada di Kota Bandung. Berikut disajikan data kemiskinan kota Bandung.

**Tabel 1.1**  
**Data Kemiskinan Di Kota Bandung Periode 2010-2013**

Tahun	Pdk. Miskin (000)	%	Garis Kemiskinan
2010	118,6	4,95	279,784
2011	116,94	4,78	292,104
2012	111,1	4,55	314,721
2013	117,71	4,78	340,355

*Sumber : BPS*

Dari data di atas, kemiskinan di kota Bandung cenderung menurun dari tahun 2010 ke 2014. Hal ini tidak terlepas dari program-program yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka mengurangi kemiskinan. Penurunan kemiskinan di kota Bandung ini tidak lantas menjadikan pemerintah maupun masyarakat mengabaikan kemiskinan yang terjadi. Namun perlu upaya-upaya agar kemiskinan kota Bandung menurun.

Salah satu cara mengukur garis kemiskinan, kota Bandung melihat indeks kebahagiaan kota Bandung yang dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Tingkat indeks kebahagiaan kota Bandung dapat dilihat dari data berikut:

**Tabel 1.2**  
**Bobot Kontribusi 10 Aspek Kehidupan dalam Indeks Kebahagiaan Kota Bandung Tahun 2014**

Aspek Kehidupan	Indeks Kebahagiaan
Pekerjaan	12,68
Pendapatan rumah tangga	14,28
Kondisi rumah dan asset	12,91
Pendidikan	12,66
Kesehatan	10,24
Keharmonisan keluarga	7,47
Hubungan sosial	7,88
Ketersediaan waktu luang	7,88
Keadaan lingkungan	6,84
Kondisi keamanan	7,18

*Sumber: Bappeda dan BPS Kota Bandung, SPTK Kota Bandung 2014*

Bobot kontribusi masing-masing aspek kehidupan berbeda nilainya, semakin besar kontribusi suatu aspek kehidupan, menunjukkan semakin penting

aspek kehidupan tersebut. Berdasarkan data di atas, ada tiga aspek kehidupan yang paling tinggi kontribusinya yaitu aspek pendapatan rumah tangga sebesar 14,28%, kondisi rumah dan asset sebesar 12,91%, dan pekerjaan sebesar 12,68%.

Pada tahun 2014 melalui Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan diperoleh Indeks Kebahagiaan diperoleh Indeks Kebahagiaan masyarakat kota Bandung sebesar 68,23 pada skala 0-100 tergolong pada kondisi bahagia. Namun demikian, Indeks Kebahagiaan kota Bandung belum maksimal karena belum mencapai skala 100. Berikut diketahui rincian Indeks Kebahagiaan Kota Bandung berdasarkan masing-masing indikator (aspek kehidupan).

**Tabel 1.3**  
**Indeks Kebahagiaan Masyarakat Kota Bandung Berdasarkan Aspek Kehidupan Tahun 2014**

<b>Aspek Kehidupan</b>	<b>Indeks Kebahagiaan</b>
Pekerjaan	68,36
Pendapatan rumah tangga	64,25
Kondisi rumah dan asset	67,36
Pendidikan	61,95
Kesehatan	69,82
Keharmonisan keluarga	76,45
Hubungan sosial	70,69
Ketersediaan waktu luang	70,17
Keadaan lingkungan	69,16
Kondisi keamanan	71,69

*Sumber: Bappeda dan BPS Kota Bandung, SPTK Kota Bandung 2014*

Berdasarkan data di atas, Indeks Kebahagiaan masyarakat Kota Bandung yang tertinggi yaitu pada kondisi keharmonisan keluarga yaitu 76,45. Urutan selanjutnya yaitu pada kondisi keamanan yaitu 71,69. Urutan ketiga indeks kebahagiaan yang tinggi yaitu pada kondisi hubungan sosial. Sedangkan pada tiga aspek kehidupan yang terpenting yaitu pendapatan rumah tangga, kondisi rumah dan asset, serta pekerjaan, nilai indeks kebahagiaannya justru lebih rendah dari aspek kehidupan yang bobot kontribusinya bukan yang paling tinggi. Masing-masing nilai indeks kebahagiaan pendapatan rumah tangga, kondisi rumah dan asset, dan pekerjaan yaitu 64,25; 67,36; 68,36 yang berarti masih perlu ditingkatkan agar kesejahteraan masyarakat Kota Bandung dapat terpenuhi.

Kemiskinan dalam Islam dipandang sebagai masalah struktural, karena Allah telah menjamin rizki setiap makhluk yang telah, sedang, dan akan

diciptakannya (QS 30:40; QS 11:6) dan pada saat yang sama Islam telah menutup peluang bagi kemiskinan kultural dengan memberi kewajiban mencari nafkah bagi setiap individu (QS 67:15). Setiap makhluk memiliki rizkinya masing-masing (QS 29:60) dan mereka tidak akan kelaparan (QS 20:15). Selain itu, dalam surah Al-Taubah ayat 711 dijelaskan secara jelas mengenai zakat sebagai bagian dari ciri seorang muslim (Amir Machmud dan Navik Istiqomah, 2013,hlm2);

*“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi sesetengahnya yang lain; mereka menyuruh berbuat kebajikan dan melarang daripada berbuat kejahatan; dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.”*

Jadi, sesungguhnya kemiskinan dalam pandangan Islam seharusnya tidak terjadi karena adanya perintah langsung dari Allah kepada makhluknya untuk menunaikan zakat. Sehingga, pendapatan masyarakat merata dan tidak terjadi ketimpangan distribusi pendapatan.

Perhatian Islam terhadap penanggulangan kemiskinan dan fakir miskin tidak dapat diperbandingkan dengan agama samawi dan aturan ciptaan manusia manapun, baik dari segi pengarahannya maupun dari segi pengaturan dan penerapannya. Semenjak fajarnya baru menyingsing di kota Makkah, Islam sudah memperhatikan masalah sosial penanggulangan kemiskinan. Adakalanya Quran merumuskannya dengan kata-kata "memberi makan dan mengajak memberi makan orang miskin" atau dengan "mengeluarkan sebahagian rezeki yang diberikan Allah", "memberikan hak orang yang meminta-meminta, miskin dan terlantar dalam perjalanan", "membayar zakat" dan rumusan lainnya. (Qaradhawi dalam Baga, 1997, hlm.3)

Program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah selama ini dinilai kurang efisien dalam mengatasi kemiskinan, contohnya BLT. Maka dari itu, dibutuhkan solusi alternatif program pengentasan kemiskinan melalui zakat. Salah satu lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam upaya pengentasan kemiskinan yang kemudian muncul BAZ di setiap daerah. Dalam hal ini, pemerintah kota Bandung menggerakkan program pengentasan kemiskinan salah satunya melalui BAZ kota Bandung. BAZ kota Bandung menggerakkan zakat profesi sebagai salah satu cara dalam mengatasi kemiskinan. Sesuai dengan pendapat Qaradhawi (1996) yang menyatakan bahwa “Diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan

atau pendapatannya secara sendiri maupun secara bersama-sama.” Fatwa ulama yang dihasilkan pada waktu Muktamar Internasional Pertama tentang zakat di Kuwait pada tanggal 30 April 1984, bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia sekarang adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang bermanfaat, baik yang dilakukan sendiri, seperti kegiatan dokter, arsitek dan yang lainnya, maupun yang dilakukan secara bersama-sama, seperti para karyawan atau para pegawai. Semuanya mendapatkan gaji (Sari,2005, hlm.553).

Adapun pendapat Al-Zuhayly (1997, hlm.275) mengenai zakat profesi (*al-mal al- mustafad*) itu wajib dikeluarkan zakatnya begitu diterima, meskipun kepemilikannya belum sampai setahun. Ketika seorang muslim telah melaksanakan kewajiban dalam membayar zakat profesinya, maka tidak diwajibkan lagi untuk membayar zakat pada akhir tahun. Zakat profesi ini memberikan keadilan terhadap umat manusia yaitu antara petani maupun profesi lainnya, yaitu adanya kewajiban dalam membayar zakat setiap kali mereka memperoleh apa yang telah dikerjakannya.

Kemiskinan jika tidak segera diatasi akan memberikan dampak buruk pada perekonomian negara terutama pada perekonomian Kota Bandung. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui sejauh mana peran zakat profesi mampu mengurangi kemiskinan di Kota Bandung. Sehingga, penelitian ini, penulis memberi judul **“OPTIMALISASI ZAKAT PROFESI DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA BANDUNG (Studi Kasus Pada Masyarakat Penerima Zakat Profesi Melalui Badan Amil Zakat di Kota Bandung).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum zakat profesi di Badan Amil Zakat Kota Bandung?
2. Bagaimana gambaran aset usaha, volume usaha, unit usaha, tenaga kerja, pengeluaran usaha, dan pendapatan bersih para penerima zakat profesi di Badan Amil Zakat Kota Bandung sebelum menerima zakat profesi?

3. Bagaimana gambaran aset usaha, volume usaha, unit usaha, tenaga kerja, pengeluaran usaha, dan pendapatan bersih para penerima zakat profesi di Badan Amil Zakat Kota Bandung sebelum menerima zakat profesi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui gambaran umum zakat profesi pada Badan Amil Zakat Kota Bandung.
- 2 Untuk mengetahui gambaran aset usaha, volume usaha, unit usaha, tenaga kerja, pengeluaran usaha, dan pendapatan bersih para penerima zakat profesi di Badan Amil Zakat Kota Bandung sebelum menerima zakat profesi.
- 3 Untuk mengetahui bagaimana gambaran aset usaha, volume usaha, unit usaha, tenaga kerja, pengeluaran usaha, dan pendapatan bersih para penerima zakat profesi di Badan Amil Zakat Kota Bandung sebelum menerima zakat profesi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang ekonomi pembangunan dan ekonomi Islam, khususnya tentang zakat profesi dan kemiskinan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau *input* dalam pengambil kebijakan seperti Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, maupun pemerintah dalam menggerakkan zakat untuk mengatasi kemiskinan.